



**INSPEKTORAT JENDERAL  
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN**

# **DATA STATISTIK PENGAWASAN 2019**



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan karunia-NYA, Buku Statistik Buku Statistik Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019 dapat diselesaikan. Penyusunan Buku Statistik Pengawasan ini merupakan bagian dari implementasi transparansi dan akuntabilitas kinerja dalam rangka *good governance* dan *clean government* Inspektorat Jenderal. Buku Statistik ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memenuhi kebutuhan beberapa pihak akan data dan informasi hasil pengawasan serta aspek pendukungnya yang dilaksanakan di Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.



Buku Statistik Pengawasan ini menggambarkan informasi tentang organisasi, pelaksanaan anggaran, realisasi audit kinerja, realisasi audit investigasi, analisis laporan hasil audit, pemantauan tindak lanjut, dan pengaduan masyarakat dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dengan Buku Statistik Pengawasan ini, diharapkan memberi dampak positif dalam meningkatkan efisiensi, efektifitas dan produktifitas kinerja seluruh jajaran di lingkungan Inspektorat Jenderal pada tahun-tahun selanjutnya.

Pada kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi atas tersusunnya Buku Statistik Pengawasan Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2019. Semoga Buku Statistik Pengawasan Inspektorat Jenderal ini dapat bermanfaat dalam penyelenggaraan pemerintah yang lebih baik pada tahun mendatang.

Pt. Inspektur Jenderal,

Ir. Laksmi Wijayanti, M.CP.  
NIP. 19690205 199503 2 001



## DAFTAR ISI

	<b>Hal</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	i
<b>DAFTAR ISI</b> .....	ii
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	iii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	iv
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Struktur Organisasi .....	2
C. Sumber Daya Pengawasan .....	6
<b>II. DATA PENGAWASAN</b> .....	9
A. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	9
B. Realisasi Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019 .....	11
C. Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	13
D. Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	16
E. Rekapitulasi Realisasi Audit Investigatif per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	17
F. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja per Provinsi sampai dengan Desember 2019 .....	21
G. Jenis Temuan Tahun 2015 s.d. 2019 .....	24
H. Jenis Rekomendasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	30
I. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2015 s.d. 2019 .....	33



**DAFTAR TABEL**

	<b>Hal</b>
Tabel 1. Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2015 s.d. 2019 .....	6
Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	9
Tabel 3. Realisasi Jumlah LHA Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019 .....	11
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah LHA Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	13
Tabel 5. Jumlah LHA Audit Kinerja pada Satker Pusat Tahun 2015 s.d. 2019 .....	16
Tabel 6. Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d 2019 .....	17
Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Audit Investigatif per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	18
Tabel 8. Realisasi Audit Investigasi pada Satker Pusat Tahun 2015 s.d. 2019 .....	21
Tabel 9. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Per Provinsi sampai dengan Desember 2019 .....	21
Tabel 10. Klasifikasi Temuan Audit Tahun 2015 s.d. 2019 .....	24
Tabel 11. Klasifikasi Jenis Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Tahun 2015 s.d. 2019 .....	30
Tabel 12. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 s.d. Tahun 2019 .....	34



## DAFTAR GAMBAR

	<b>Hal</b>
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal .....	3
Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal .....	4
Gambar 3. Wilayah Kerja Pengawasan APIP-KLHK .....	5
Gambar 4. Grafik Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2015 s.d. 2019 .....	7
Gambar 5. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	10
Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019 .....	12
Gambar 7. Persentase Realisasi Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	15
Gambar 8. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	17
Gambar 9. Persentase Realisasi Audit Investigasi per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	20
Gambar 10. Persentase Klasifikasi Temuan Audit Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Tahun 2015 s.d. 2019 .....	26
Gambar 11. Persentase Klasifikasi Temuan Audit Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2015 s.d. 2019 .....	27
Gambar 12. Persentase Klasifikasi Temuan Audit 3E Tahun 2015 s.d. 2019 .....	28
Gambar 13. Persentase Klasifikasi Jenis Rekomendasi Tahun 2015 s.d. 2019 .....	32





## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sebagai Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menyelenggarakan tugas dan fungsinya melalui pelaksanaan audit (audit kinerja, reviu laporan keuangan, dan evaluasi SAKIP), audit dengan tujuan tertentu, penilaian dan evaluasi, serta pemantauan tindak lanjut dan pembinaan. Hasil pelaksanaan kegiatan pengawasan tersebut senantiasa dimonitor, dievaluasi, dan dipublikasikan secara berkala dan transparan, serta didokumentasikan sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.19/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Statistik Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, perwujudan peran APIP yang efektif, yaitu 1) memberikan keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; 2) memberikan peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah; dan 3) memelihara dan meningkatkan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah.

Hasil pengawasan yang dituangkan dalam buku Statistik Pengawasan Periode 2015 s.d. 2019 diharapkan dapat memberikan gambaran aktual, akurat, dan lengkap, meliputi pelaksanaan audit, pemantauan tindak lanjut hasil audit yang didukung dengan struktur organisasi, sumber daya manusia, sumber dana, peraturan, dan perundang-undangan yang berlaku. Selain itu juga, disajikan gambaran cakupan sasaran audit, di antaranya jumlah objek pemeriksaan/audit, sasaran pengawasan lainnya, dan alokasi anggaran pengawasan lingkungan hidup dan kehutanan di lingkup Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

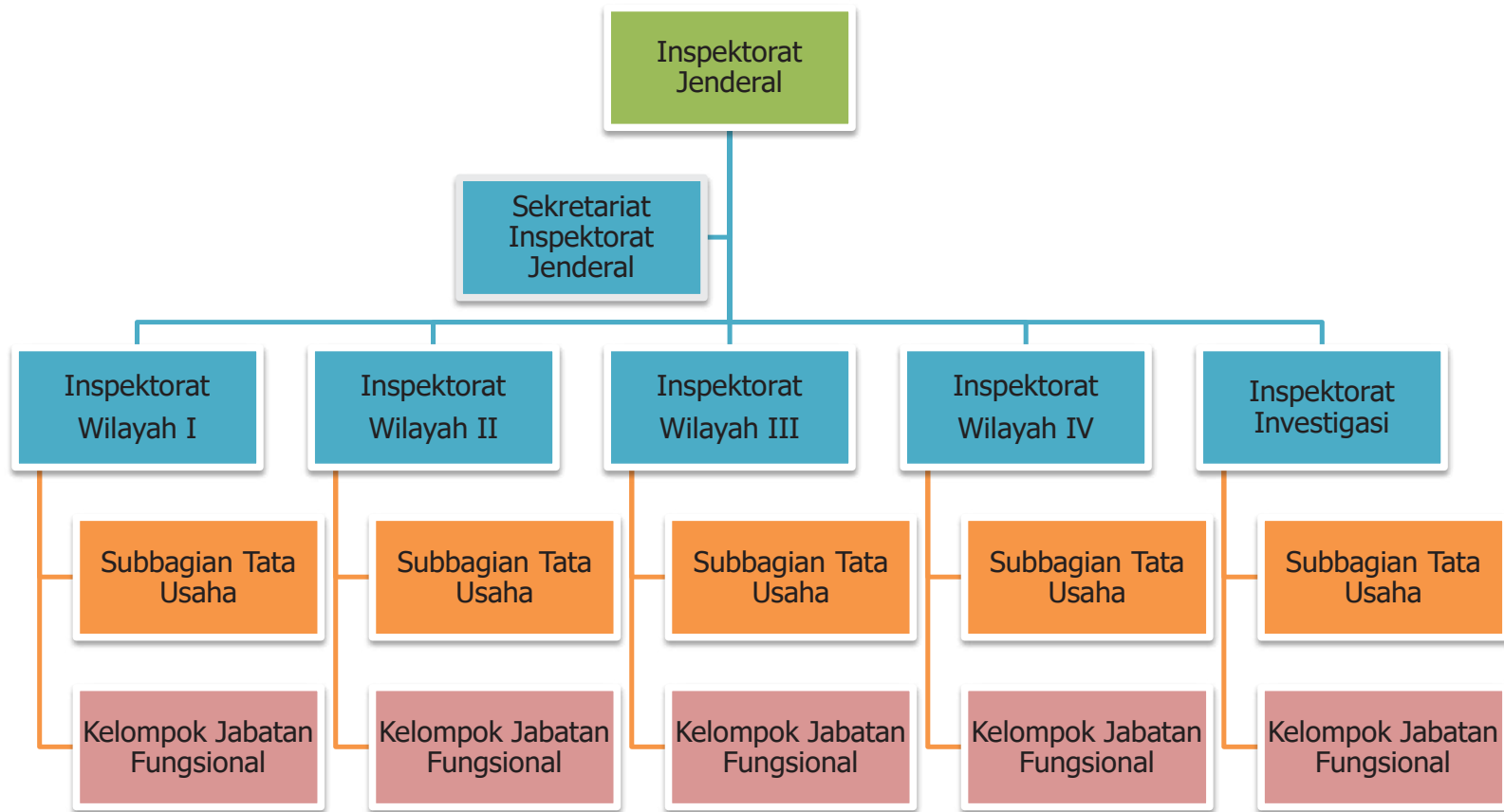
Buku Statistik Pengawasan Tahun 2019 diterbitkan untuk memenuhi kebutuhan dari para pihak tentang hasil penyelenggaraan kegiatan pengawasan lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta sebagai bahan penetapan kebijakan pengawasan selanjutnya.

## B. Struktur Organisasi

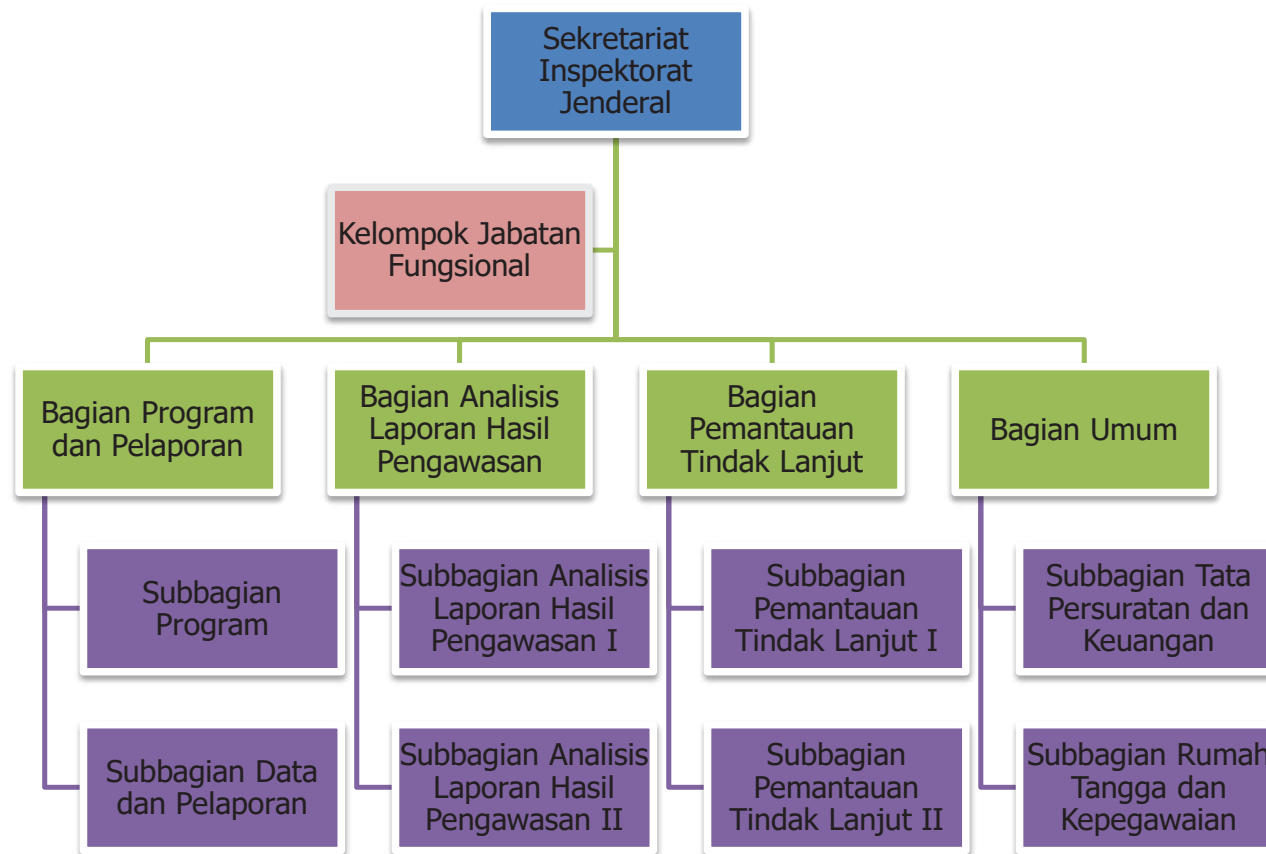
Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/ MenLHK-II/2015, Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Inspektorat Jenderal menyelenggarakan fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. pelaksanaan urusan administrasi Inspektorat Jenderal; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi tersebut, Inspektorat Jenderal dibantu oleh unit organisasi Eselon II yang meliputi Sekretariat Inspektorat Jenderal, Inspektorat Wilayah I, Inspektorat Wilayah II, Inspektorat Wilayah III, Inspektorat Wilayah IV, dan Inspektorat Investigasi. Wilayah kerja pengawasan APIP-KLHK dan struktur organisasi Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dapat ditunjukkan sebagaimana Gambar 1, Gambar 2, dan Gambar 3.



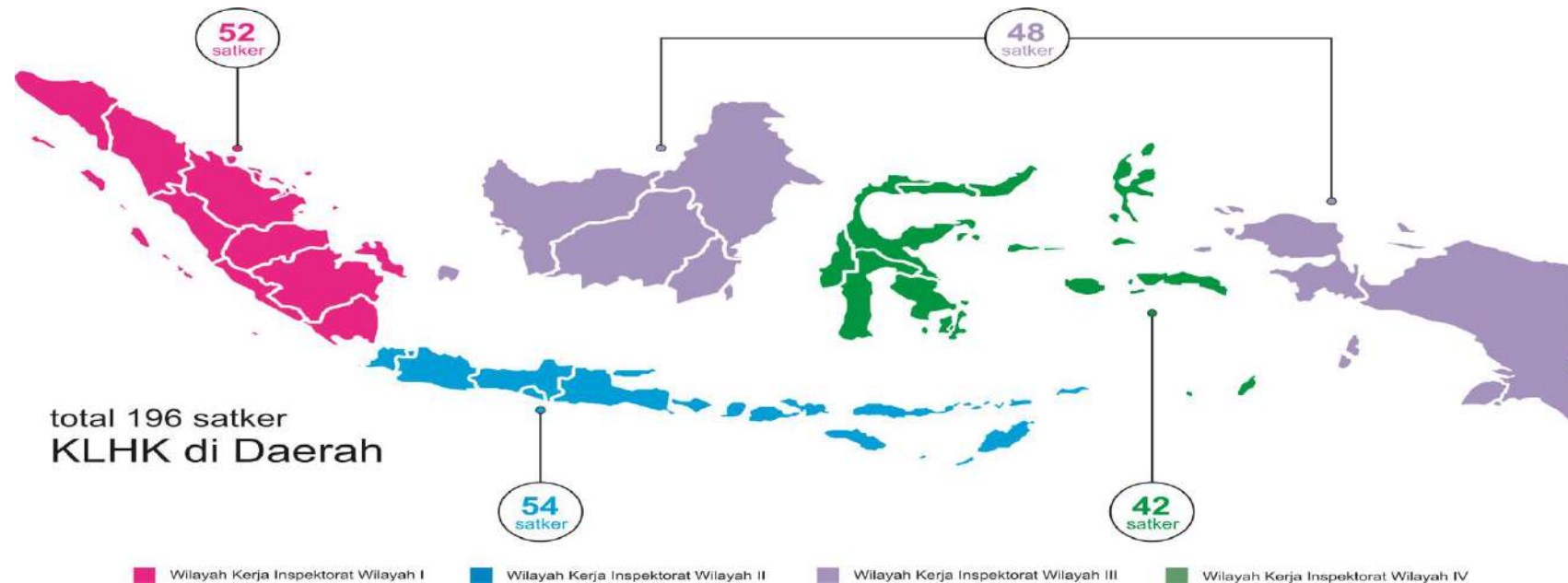
Gambar 1. Struktur Organisasi Inspektorat Jenderal



Gambar 2. Struktur Organisasi Sekretariat Inspektorat Jenderal

**Wilayah Kerja APIP – KLHK**

Inspektorat Wilayah I	Inspektorat Wilayah II	Inspektorat Wilayah III	Inspektorat Wilayah IV	Inspektorat Investigasi
Inspektorat Jenderal Ditjen KSDAE Ditjen PPKL UPT di wil. Sumatera	Ditjen PDASHL Ditjen PSKL BP2SDM UPT di wil. Jawa, Bali, NTB dan NTT	Ditjen PHPL Ditjen PSLB3 Ditjen PHLHK Balitbangin UPT di wil. Kalimantan dan Papua	Setjen Ditjen PKTL Ditjen PPI UPT di wil. Sulawesi dan Maluku	Seluruh unit eselon I dan UPT di seluruh wilayah Indonesia



Gambar 3. Wilayah Kerja Pengawasan APIP-KLHK

### C. Sumber Daya Pengawasan

Untuk melakukan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pembangunan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan baik di pusat maupun di daerah, Inspektorat Jenderal didukung oleh pejabat fungsional Auditor. Kualifikasi Auditor pada tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Tabel 1.

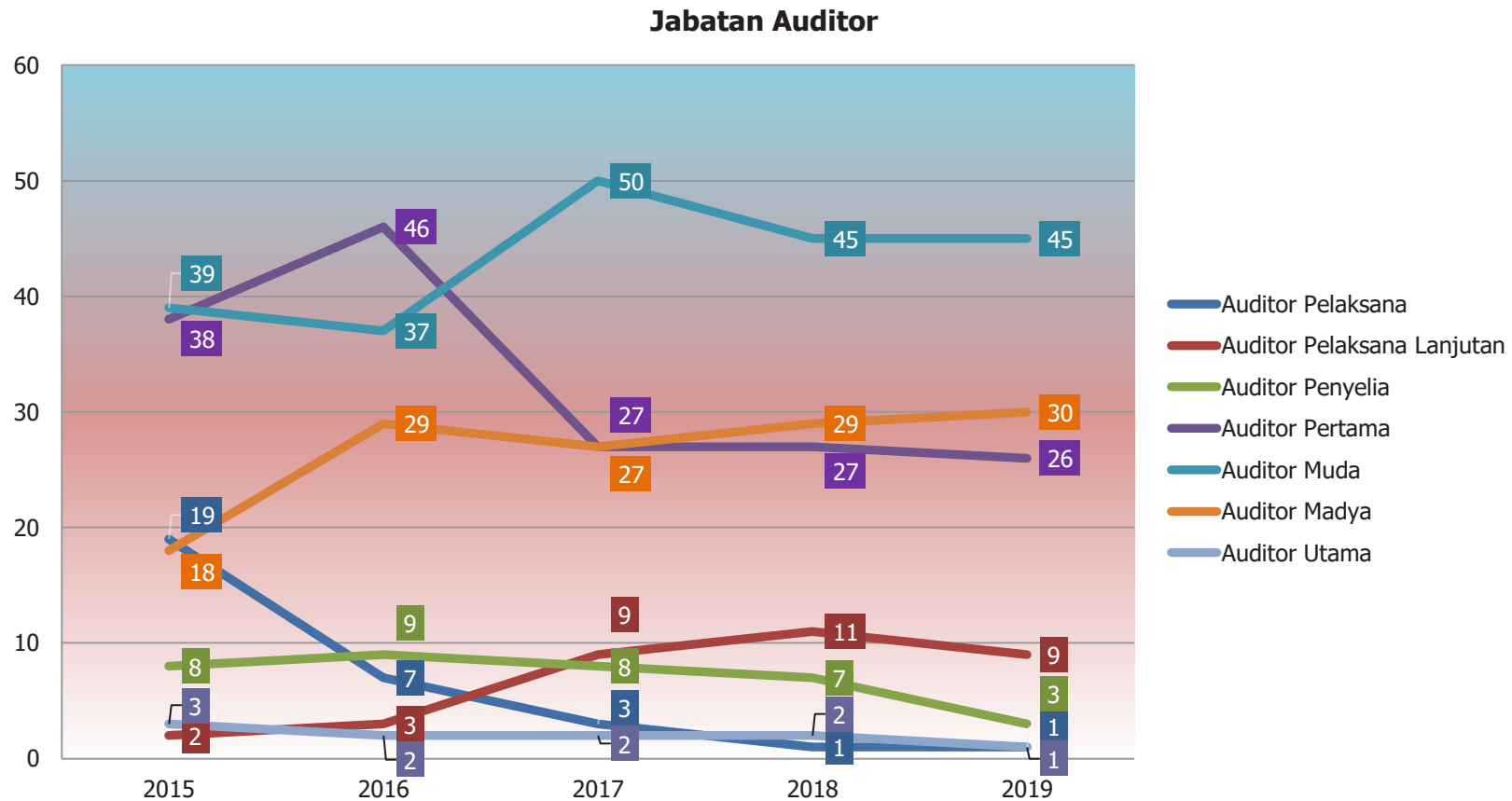
Tabel 1. Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Jabatan	2015		2016		2017		2018		2019	
		L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
1.	Auditor Utama	3	0	2	0	2	0	2	0	1	0
2.	Auditor Madya	14	4	24	5	21	6	24	5	24	6
3.	Auditor Muda	36	3	34	3	44	6	39	6	39	6
4.	Auditor Pertama	31	7	36	10	18	9	18	9	18	8
5.	Auditor Penyelia	8	0	9	0	8	0	8	0	3	0
6.	Auditor Pelaksana Lanjutan	2	0	2	1	7	2	7	2	6	3
7.	Auditor Pelaksana	12	7	6	1	1	2	1	2	0	1
<b>Jumlah</b>		106	21	113	20	101	25	98	24	91	24
<b>Total</b>		<b>127</b>		<b>133</b>		<b>126</b>		<b>122</b>		<b>115</b>	

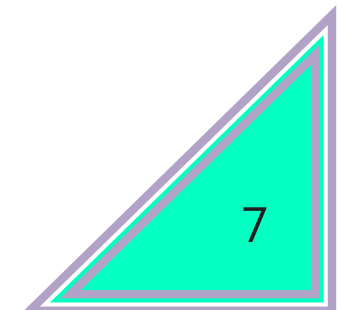
Keterangan: berdasarkan data kepegawaian Inspektorat Jenderal

Sesuai dengan data yang ditampilkan pada Tabel 1, diketahui bahwa jumlah Auditor meningkat dari tahun 2015 s.d. 2016. Kenaikan jumlah Auditor tahun 2014 ke tahun 2015 ke tahun 2016 karena penggabungan antara Kementerian Kehutanan dengan Kementerian Lingkungan Hidup. Akan tetapi, pada tahun 2017 ke tahun 2018 dan tahun 2019 jumlah Auditor berkurang cukup signifikan. Hal ini disebabkan adanya Auditor yang alih jabatan, alih tugas, purnatugas dan meninggal dunia tanpa diimbangi dengan penerimaan pegawai.

Berdasarkan Tabel 1 maka dibuat grafik perkembangan kualifikasi Auditor tahun 2015 s.d. 2019. Dari kualifikasi Auditor Inspektorat Jenderal yang ada maka dapat dilihat jumlah pejabat fungsional Auditor paling banyak adalah kualifikasi Auditor Muda pada tahun 2017 dan tahun 2019.



Gambar 4. Grafik Perkembangan Kualifikasi Auditor Tahun 2015 s.d. 2019





Berdasarkan grafik perkembangan kualifikasi Auditor di atas, terlihat bahwa jumlah auditor dalam tiga tahun terakhir mengalami penurunan (18 orang dari jumlah tertinggi ditahun 2016 yaitu 133 orang menjadi 115 orang ditahun 2019), hal ini disebabkan oleh beberapa auditor sudah alih jabatan, alih tugas, dan purna tugas dan beberapa yang meninggal dunia. Data pada grafik juga menggambarkan bahwa dalam dua tahun terakhir terjadi penurunan pada jumlah auditor di jenjang jabatan auditor Muda karena proses kenaikan jabatan menjadi auditor Madya (5 orang dari jumlah tertinggi ditahun 2017 yaitu 50 orang menjadi 45 orang ditahun 2018 dan 2019), penurunan auditor pada jenjang auditor pertama dan (20 orang dari jumlah ditahun 2016 yaitu 46 orang menjadi 26 orang ditahun 2019), pada jenjang auditor pelaksana ini menyebabkan penurunan yang signifikan (18 orang dari jumlah tertinggi ditahun 2015 yaitu 19 orang menjadi 1 orang ditahun 2019), auditor pada jenjang auditor madya mengalami kenaikan yang semula di tahun 2015 berjumlah 18 orang menjadi 30 orang di tahun 2019.

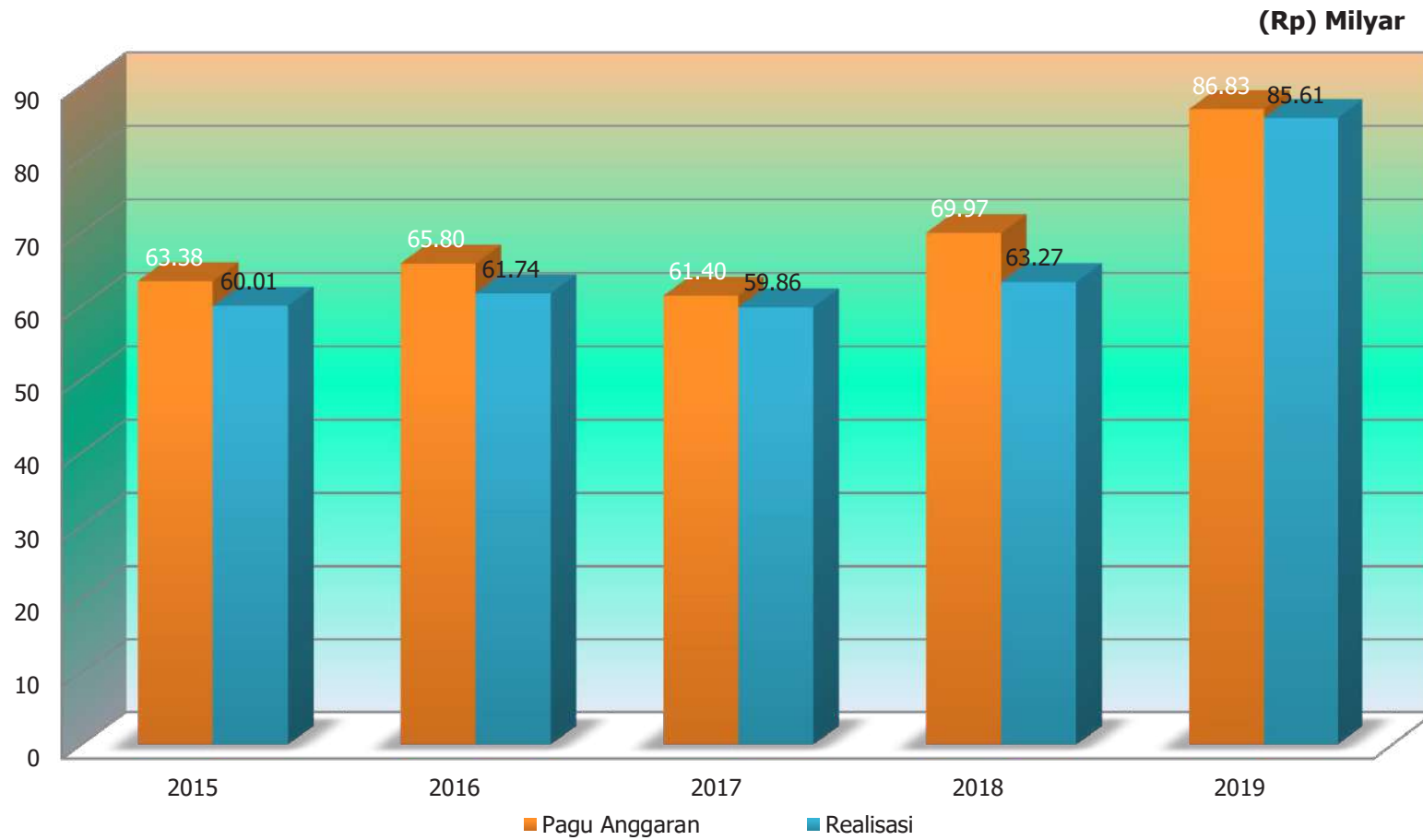
## BAB II DATA PENGAWASAN

### A. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019

Perkembangan anggaran pengawasan dan realisasi tahun 2015 s.d. 2019 disajikan pada Tabel 2 dan Gambar 5.

Tabel 2. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019

Tahun	Pagu Anggaran	Realisasi	Persentase %
	(Rp)		
<b>2015</b>	63.379.435.000,00	60.005.205.350,00	94,68
<b>2016</b>	65.795.221.000,00	61.739.659.627,00	93,84
<b>2017</b>	61.401.402.000,00	59.861.255.089,00	97,49
<b>2018</b>	64.970.525.000,00	63.274.924.982,00	97,39
<b>2019</b>	86.837.312.000,00	85.617.728.663,00	98,60



Gambar 5. Perkembangan Anggaran Pengawasan dan Realisasi Tahun 2015 s.d. 2019

## B. Realisasi Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019

Audit Kinerja adalah pemeriksaan secara objektif dan sistematis terhadap berbagai macam bukti, untuk dapat melakukan penilaian secara independen atas kinerja entitas atau program/kegiatan Pemerintah yang diaudit. Laporan hasil audit merupakan salah satu tahap paling penting dan akhir dari suatu pekerjaan audit. Perbandingan target dan realisasi jumlah laporan hasil audit (LHA) audit kinerja tahun 2015 s.d. 2019 disajikan pada Tabel 3.

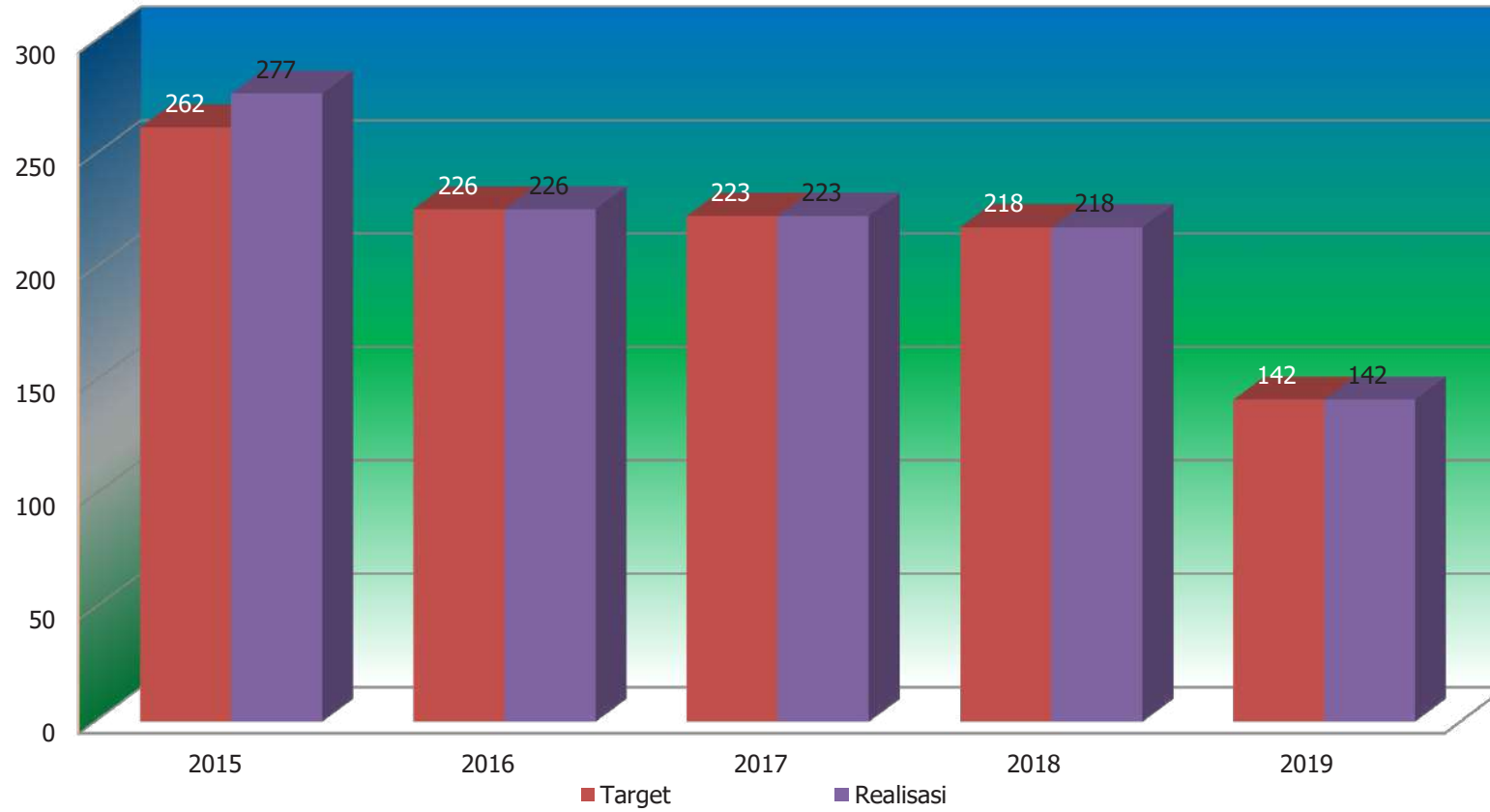
Tabel 3. Realisasi Jumlah LHA Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Target	Realisasi	Persentase
1.	2015	262	277	105,73%
2.	2016	226	226	100,00%
3.	2017	223	223	100,00%
4.	2018	218	218	100,00%
5.	2019	142	142	100,00%
<b>Jumlah</b>		<b>1071</b>	<b>1086</b>	<b>101,40%</b>

Pada tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya realisasi jumlah LHA Audit Kinerja berdasarkan PKPT untuk tahun 2015 lebih besar daripada target, sedangkan pada tahun 2016, 2017, 2018, dan 2019 persentase realisasi jumlah LHA Audit Kinerja adalah 100%.

Berdasarkan Tabel 3 maka dibuat grafik perbandingan antara target dan realisasi jumlah LHA yang menunjukkan bahwa pada tahun 2015 s.d. 2019 realisasi jumlah LHA pada umumnya lebih besar daripada target ataupun sama dengan jumlah target. Jumlah LHA yang lebih besar daripada target disebabkan bahwa pelaksanaan audit pada satu Satker dapat menghasilkan lebih dari 1 LHA untuk Audit Dana Dekonsentrasi.

### LHA Audit Kinerja



Gambar 6. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Kinerja Berdasarkan PKPT Tahun 2015 s.d. 2019

**C. Rekapitulasi Realisasi Laporan Hasil Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019**

Realisasi laporan hasil audit (LHA) tahun 2015 s.d 2019 adalah sebanyak 1.086 LHA untuk 34 provinsi dan pusat. Rekapitulasi realisasi Audit Kinerja per provinsi tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel 4.

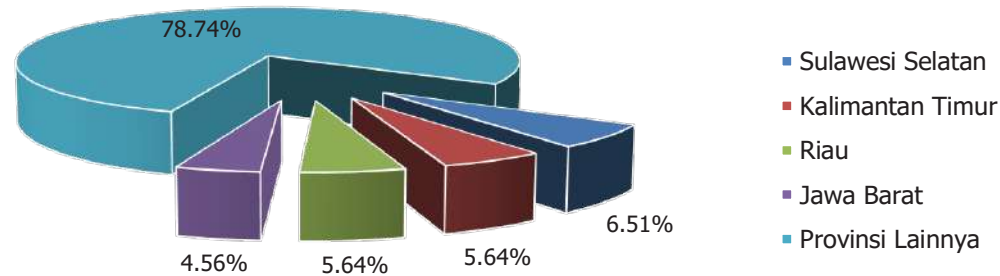
Tabel 4. Rekapitulasi Jumlah LHA Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Audit /Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Aceh	7	4	3	4	2	20
2.	Sumatera Utara	6	7	9	10	4	36
3.	Sumatera Barat	5	5	3	2	4	19
4.	Riau	6	11	9	6	10	42
5.	Kepulauan Riau	5	2	0	2	2	11
6.	Jambi	5	9	5	4	4	27
7.	Bengkulu	5	2	2	0	1	11
8.	Sumatera Selatan	7	7	6	6	4	30
9.	Bangka Belitung	5	2	1	2	1	11
10.	Lampung	9	2	5	5	3	24
11.	DKI Jakarta	1	2	2	2	2	9
12.	Banten	1	3	0	1	1	6
13.	Jawa Barat	9	10	10	8	5	42
14.	D I Yogyakarta	3	8	6	5	3	25
15.	Jawa Tengah	10	8	6	5	3	32
16.	Jawa Timur	6	8	6	7	6	33

No.	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Audit /Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
17.	Bali	5	9	6	8	6	34
18.	Nusa Tenggara Timur	6	5	7	6	5	29
19.	Nusa Tenggara Barat	4	2	5	0	4	15
20.	Kalimantan Barat	9	8	7	8	8	40
21.	Kalimantan Tengah	9	6	7	7	6	35
22.	Kalimantan Selatan	4	6	6	5	3	24
23.	Kalimantan Timur	15	8	11	8	10	52
24.	Kalimantan Utara	0	0	1	0	1	2
25.	Papua	8	9	7	7	2	33
26.	Papua Barat	5	6	9	7	5	32
27.	Gorontalo	8	4	2	2	1	17
28.	Sulawesi Utara	17	7	6	4	4	38
29.	Sulawesi Selatan	20	12	9	14	5	60
30.	Sulawesi Tenggara	16	6	5	5	6	38
31.	Sulawesi Tengah	15	7	5	4	6	37
32.	Sulawesi Barat	5	3	1	1	0	10
33.	Maluku	9	8	6	6	5	34
34.	Maluku Utara	5	4	2	2	1	14
<b>Jumlah</b>		<b>250</b>	<b>200</b>	<b>175</b>	<b>164</b>	<b>133</b>	<b>922</b>

Pada Tabel 4 bahwa pada tahun 2015 s.d. 2019 jumlah LHA yang paling banyak adalah pertama Provinsi Sulawesi Selatan sebanyak 60 LHA, urutan ke dua Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 52 LHA, dan urutan ke tiga Provinsi Riau dan Jawa Barat sebanyak 42 LHA dengan persentase jumlah audit pada Provinsi Sulawesi Selatan (6,51%), Provinsi Kalimantan Timur (5,64%), dan Provinsi Riau dan Jawa Barat (4,56%), ini dipengaruhi jumlah UPT/Satker pada provinsi tersebut lebih banyak dibandingkan dengan provinsi lainnya.

### Realisasi Audit Kinerja



Gambar 7. Persentase Realisasi Audit Kinerja per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019



Selain pada Satker Daerah, tahun 2015 s.d. 2019 telah dilakukan audit kinerja pada Satker Pusat. Realisasi audit kinerja pada Satker Pusat tahun 2015 s.d 2019 dapat dilihat pada Tabel 5.

Tabel 5. Jumlah LHA Audit Kinerja pada Satker Pusat Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Jumlah Laporan Hasil Audit
1.	2015	27
2.	2016	26
3.	2017	48
4.	2018	54
5.	2019	9
<b>Jumlah</b>		<b>164</b>

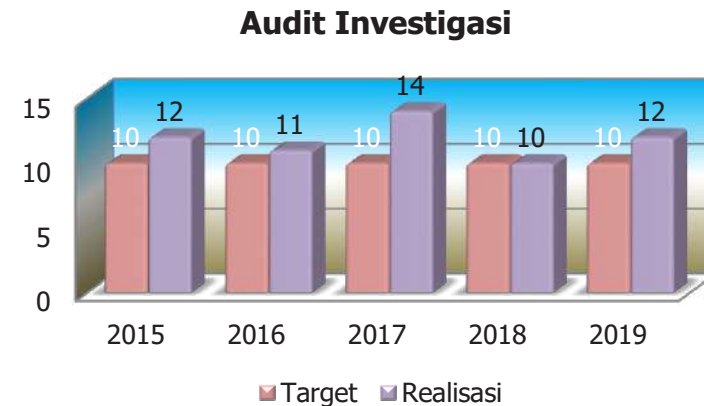
Berdasarkan data Tabel 5 diketahui dari tahun 2015 s.d. 2019 audit satker pusat mengalami peningkatan pada tahun 2018 sebanyak 75% satker pusat telah dilakukan audit, hal ini karena fokus pengawasan menitikberatkan kepada peningkatan kinerja program Kementerian yang diyakini dapat diperoleh dengan mengawal program yang ada pada satker pusat KLHK. Akan tetapi pada tahun 2019 mengalami penurunan yang sangat signifikan karena adanya program mengawal Pendampingan Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitas Hutan dan Lahan.

#### **D. Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d. 2019**

Audit investigasi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengumpulan bahan, meneliti, menganalisis, dan mengevaluasi atas kasus pelanggaran yang berindikasi praktik-praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, pelanggaran administrasi, menindaklanjuti pengaduan masyarakat, serta melaksanakan tugas lain berdasarkan instruksi khusus Menteri dan cakupan yang ditetapkan oleh Inspektur Jenderal. Realisasi audit investigasi dari tahun 2015 s.d. 2019 disajikan selengkapnya pada Tabel 6 dan Gambar 8 di bawah ini.

Tabel 6. Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d 2019

No.	Tahun	Target (kasus)	Realisasi	Persentase (%)
1.	2015	10	12	120
2.	2016	10	11	110
3.	2017	10	14	140
4.	2018	10	10	100
5.	2019	10	12	120
<b>Jumlah</b>		<b>50</b>	<b>59</b>	<b>118</b>



Gambar 8. Perbandingan Target dan Realisasi Audit Investigasi Tahun 2015 s.d 2019

Berdasarkan Tabel 6 dan Gambar 8 menunjukkan bahwa pada tahun 2015 s.d 2019 realisasi audit investigasi lebih besar daripada target yang ditetapkan. Hal ini dipengaruhi oleh banyaknya pengaduan masyarakat yang diterima oleh Inspektorat Jenderal.

### E. Rekapitulasi Realisasi Audit Investigatif per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019

Audit investigatif adalah kegiatan pemeriksaan dengan lingkup tertentu, periodenya tidak dibatasi, lebih spesifik pada area-area pertanggungjawaban yang diduga mengandung in efisiensi atau indikasi penyalahgunaan wewenang, dengan hasil audit berupa rekomendasi untuk ditindaklanjuti bergantung pada derajat penyimpangan wewenang yang ditemukan. Rekapitulasi Audit Investigasi per provinsi tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Tabel 7.

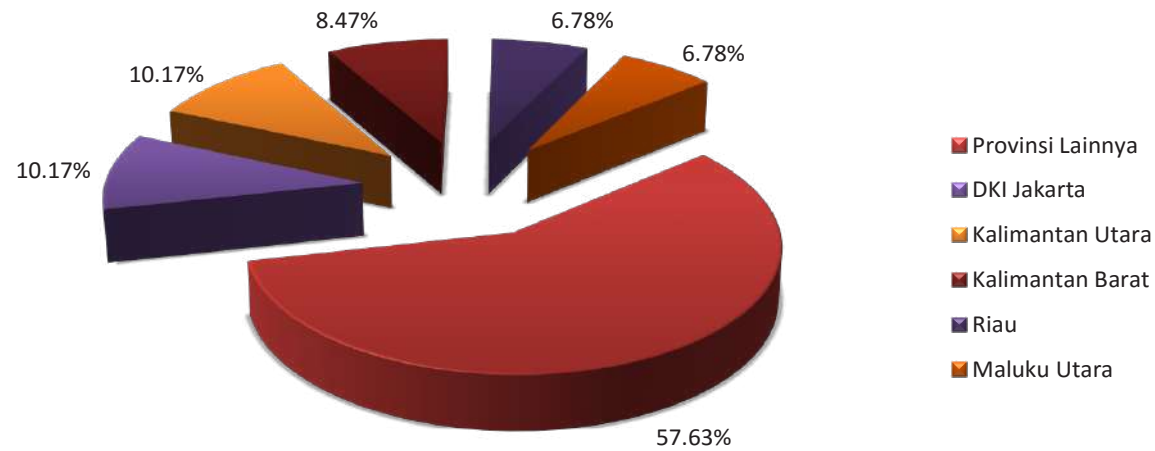
Tabel 7. Rekapitulasi Realisasi Audit Investigatif per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Audit /Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Aceh	0	0	0	0	1	1
2.	Sumatera Utara	1	0	1	0	0	2
3.	Sumatera Barat	0	0	0	1	0	1
4.	Riau	3	0	0	0	1	4
5.	Kepulauan Riau	0	0	0	0	0	0
6.	Jambi	0	1	1	0	1	3
7.	Bengkulu	0	1	0	1	0	2
8.	Sumatera Selatan	0	1	0	0	0	1
9.	Bangka Belitung	0	0	0	0	1	1
10.	Lampung	1	0	0	0	1	2
11.	DKI Jakarta	1	1	0	1	3	6
12.	Banten	0	1	1	0	0	2
13.	Jawa Barat	0	0	0	1	1	2
14.	D I Yogyakarta	0	0	1	0	0	1
15.	Jawa Tengah	1	0	0	0	0	1
16.	Jawa Timur	0	0	0	0	3	3
17.	Bali	0	0	0	0	0	0
18.	Nusa Tenggara Timur	1	0	0	0	0	1
19.	Nusa Tenggara Barat	0	0	0	0	0	0

No.	Provinsi	Jumlah Laporan Hasil Audit /Tahun					Total
		2015	2016	2017	2018	2019	
20.	Kalimantan Barat	0	2	2	0	1	5
21.	Kalimantan Tengah	0	1	1	0	0	2
22.	Kalimantan Selatan	0	0	0	0	0	0
23.	Kalimantan Timur	0	0	0	0	0	0
24.	Kalimantan Utara	1	1	0	2	2	6
25.	Papua	0	0	0	0	1	1
26.	Papua Barat	0	0	1	0	0	1
27.	Gorontalo	0	0	1	0	0	1
28.	Sulawesi Utara	0	0	0	0	0	0
29.	Sulawesi Selatan	0	0	0	1	0	1
30.	Sulawesi Tenggara	0	0	0	0	0	0
31.	Sulawesi Tengah	1	0	0	1	0	2
32.	Sulawesi Barat	0	0	0	0	0	0
33.	Maluku	1	0	1	1	0	3
34.	Maluku Utara	1	1	1	1	0	4
<b>Jumlah</b>		<b>12</b>	<b>10</b>	<b>11</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>59</b>

Pada Tabel 7 terlihat bahwa pada tahun 2015 s.d. 2019, provinsi yang paling banyak dilaksanakan audit investigatif adalah Provinsi DKI Jakarta dan Kalimantan Utara sebanyak 6 kasus. Urutan kedua Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 5 kasus. Serta urutan ketiga Provinsi Riau dan Maluku Utara sebanyak 4 kasus.

### Realisasi Audit Investigasi



Gambar 9. Persentase Realisasi Audit Investigasi per Provinsi Tahun 2015 s.d. 2019

Berdasarkan Tabel 7 maka dibuat grafik perbandingan realisasi Audit Investigatif selama lima tahun. Pada Gambar 8, tahun 2015 s.d. 2019 jumlah lima provinsi terbanyak diaudit adalah DKI Jakarta (10,17%), Kalimantan Utara (10,17%), Kalimantan Barat (8,47%), Riau (6,78%), dan Maluku Utara (6,78%).

Selain pada Satker daerah, tahun 2015 s.d. 2019 telah dilakukan audit investigasi pada Satker Pusat. Realisasi audit investigatif pada Satker Pusat tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8. Realisasi Audit Investigasi pada Satker Pusat Tahun 2015 s.d. 2019

No.	Tahun	Jumlah Kasus yang Diaudit
1.	2015	0
2.	2016	1
3.	2017	3
4.	2018	0
5.	2019	2
<b>Jumlah</b>		<b>6</b>

#### F. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Audit Kinerja per Provinsi sampai dengan Desember 2019

Tabel 9. Rekapitulasi Pemantauan Tindak Lanjut Temuan/Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Per Provinsi sampai dengan Desember 2019

No.	Provinsi	Hasil Audit		Tindak Lanjut		Sisa	
		Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	Temuan	Rekom
1.	Bangka Belitung	222	389	214	374	8	15
2.	Bali	933	1.842	880	1.714	53	128
3.	Banten	259	499	257	493	2	6
4.	Bengkulu	429	791	420	766	9	25
5.	DIY	567	1054	556	1035	11	19
6.	DKI Jakarta	297	662	273	603	24	59
7.	Gorontalo	387	724	377	705	10	19
8.	Jawa barat	1.231	2.476	1.166	2.319	65	157

No.	Provinsi	Hasil Audit		Tindak Lanjut		Sisa	
		Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	Temuan	Rekom
9.	Jambi	1.152	2.078	1.146	2.070	6	8
10.	Jawa Tengah	848	1.617	831	1.575	17	42
11.	Jawa Timur	1.162	2.374	1.125	2.283	37	91
12.	Kalimantan Barat	1026	1.971	978	1.873	48	98
13.	Kalimantan Selatan	924	1.716	909	1.682	15	34
14.	Kalimantan Tengah	1.095	2.058	1071	2.021	24	37
15.	Kalimantan Timur	1.409	2.633	1.377	2.586	32	47
16.	Kepulauan Riau	248	441	243	430	5	11
17.	Lampung	850	1.550	843	1.539	7	11
18.	Maluku	950	1.985	920	1.946	30	39
19.	Maluku Utara	468	988	456	974	12	14
20.	Aceh	545	979	537	970	8	9
21.	NTB	592	1044	581	1028	11	16
22.	NTT	1009	2.094	967	1.990	42	104
23.	Papua	806	1.641	774	1.592	32	49
24.	Papua Barat	753	1.589	732	1.560	21	29
25.	Pusat	3.050	5.467	2.969	5.318	81	149
26.	Riau	1.310	2.361	1.282	2.317	28	44
27.	Sulawesi Barat	201	450	196	444	5	6
28.	Sulawesi Selatan	1.653	3.126	1.614	3.039	39	87
29.	Sulawesi Tengah	988	2.000	956	1.950	32	50

No.	Provinsi	Hasil Audit		Tindak Lanjut		Sisa	
		Temuan	Rekom	Temuan	Rekom	Temuan	Rekom
30.	Sulawesi Tenggara	955	1.828	939	1.802	16	26
31.	Sulawesi Utara	916	1.824	897	1.800	19	24
32.	Sumatera Barat	732	1.334	718	1.314	14	20
33.	Sumatera Selatan	1.113	1.876	1.087	1.842	26	34
34.	Sumatera Utara	1.769	3.237	1.745	3.194	24	43
<b>Jumlah</b>		<b>30.849</b>	<b>58.698</b>	<b>30.036</b>	<b>57.148</b>	<b>813</b>	<b>1.550</b>

Berdasarkan Tabel 9 di atas menunjukkan perkembangan tindak lanjut hasil audit kinerja yang masih terdapat sisa tunggakan temuan/rekomendasi paling banyak di Pusat (Eselon I Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan), Jawa Barat, dan Bali. Sisa temuan/rekomendasi signifikan yang belum dapat diselesaikan berada di Pusat terutama terkait dengan Pengelolaan Aset Tetap, Pengelolaan dan Penatausahaan Barang yang Belum Tertib, NSPK Sanksi Pemegang Izin Belum Disusun, Pertanggungjawaban Biaya Nonpersonil Belum Memadai, Pertanggungjawaban Keuangan Tidak Sesuai Standar Biaya Umum (SBU), serta Pengelolaan Rumah Negara Belum Tertib.

Sisa temuan/rekomendasi signifikan yang belum dapat diselesaikan di Provinsi Papua terutama terkait dengan Pengelolaan Pembayaran Pendapatan Nasional Bukan Pajak Dana Reboisasi dan Provisi Sumber Daya Hutan (PNBP DR dan PSDH), Pengadaan Barang/Jasa (B/J), Status Tanah dan Bangunan Negara, Dana Alokasi Khusus (DAK) DR di Dinas Kehutanan Kabupaten, Pertanggungjawaban Keuangan Belum Tertib/Tidak Sesuai SBU, serta Desain/*Monitoring* Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP).

Sisa temuan/rekomendasi signifikan yang belum dapat diselesaikan di Provinsi Papua Barat terutama terkait dengan Pengelolaan PNBP DR dan PSDH di Dinas Kehutanan Kabupaten, Pertanggungjawaban Keuangan Belum Tertib/Tidak Sesuai SBU, Pengelolaan BMN Tidak Tertib, Desain/*Monitoring* Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP), serta Pengadaan Barang/Jasa (B/J).



**G. Jenis Temuan Tahun 2015 s.d. 2019**

Kodefikasi temuan hasil audit kinerja Inspektorat Jenderal Kementerian LHK tahun 2015 s.d. 2019 berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. 42 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Ikhtisar Laporan Hasil Pengawasan Aparat Pengawas Intern Pemerintah. Jenis dan jumlah temuan hasil audit kinerja tahun 2015 s.d. 2019 tersaji pada Tabel 10.

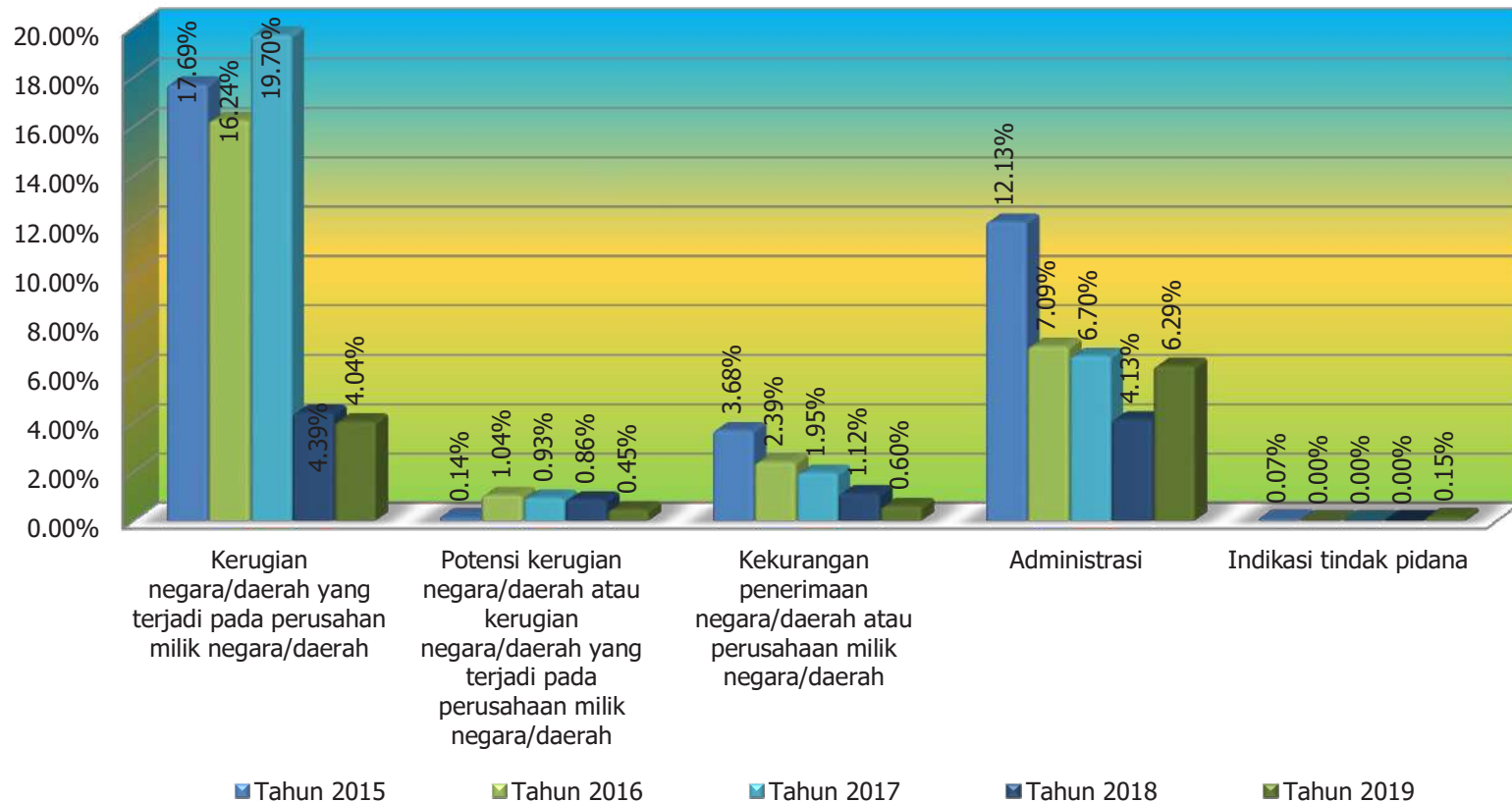
Tabel 10. Klasifikasi Temuan Audit Tahun 2015 s.d. 2019

Kel	Sub Kel	Deskripsi	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jml	%	Jml	%
1		Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan	<b>467</b>	<b>33.72</b>	<b>336</b>	<b>26.75</b>	<b>376</b>	<b>29.28</b>	<b>122</b>	<b>10.49</b>	<b>77</b>	<b>11.53</b>
	01	Kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	245	17.69	204	16.24	253	19.70	51	4.39	27	4.04
	02	Potensi kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah	2	0.14	13	1.04	12	0.93	10	0.86	3	0.45
	03	Kekurangan penerimaan negara/daerah atau perusahaan milik negara/daerah	51	3.68	30	2.39	25	1.95	13	1.12	4	0.60
	04	Administrasi	168	12.13	89	7.09	86	6.70	48	4.13	42	6.29

Kel	Sub Kel	Deskripsi	Tahun 2015		Tahun 2016		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019	
			Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jml	%	Jml	%
2	05	Indikasi tindak pidana	1	0.07	0	0.00	0	0.00	0	0.00	1	0.15
		Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern	<b>583</b>	<b>42.09</b>	<b>672</b>	<b>53.50</b>	<b>637</b>	<b>49.61</b>	<b>739</b>	<b>63.54</b>	<b>401</b>	<b>60.03</b>
	01	Kelemahan sistem pengendalian dan pelaporan akuntansi	289	20.87	313	24.92	238	18.54	207	17.80	93	13.92
	02	Kelemahan sistem pengendalian pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja	187	13.50	201	16.00	201	15.65	230	19.78	124	18.56
	03	Kelemahan struktur pengendalian intern	107	7.73	158	12.58	198	15.42	302	25.97	184	27.54
3		Temuan 3E	<b>335</b>	<b>24.19</b>	<b>248</b>	<b>19.75</b>	<b>271</b>	<b>21.11</b>	<b>302</b>	<b>25.97</b>	<b>190</b>	<b>28.44</b>
	01	Ketidakhematan/pemborosan/ketidakekonomisan	7	0.51	15	1.19	18	1.40	11	0.95	1	0.15
	02	Ketidakefisienan	15	1.08	5	0.40	4	0.31	1	0.09	1	0.15
	03	Ketidakefektifan	313	22.60	228	18.15	249	19.39	290	24.94	188	28.14
		<b>Jumlah</b>	<b>1.385</b>	<b>100</b>	<b>1.256</b>	<b>100</b>	<b>1.284</b>	<b>100</b>	<b>1.163</b>	<b>100</b>	<b>668</b>	<b>100</b>

Untuk melihat perbandingan setiap jenis temuan tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Gambar 10 berikut.

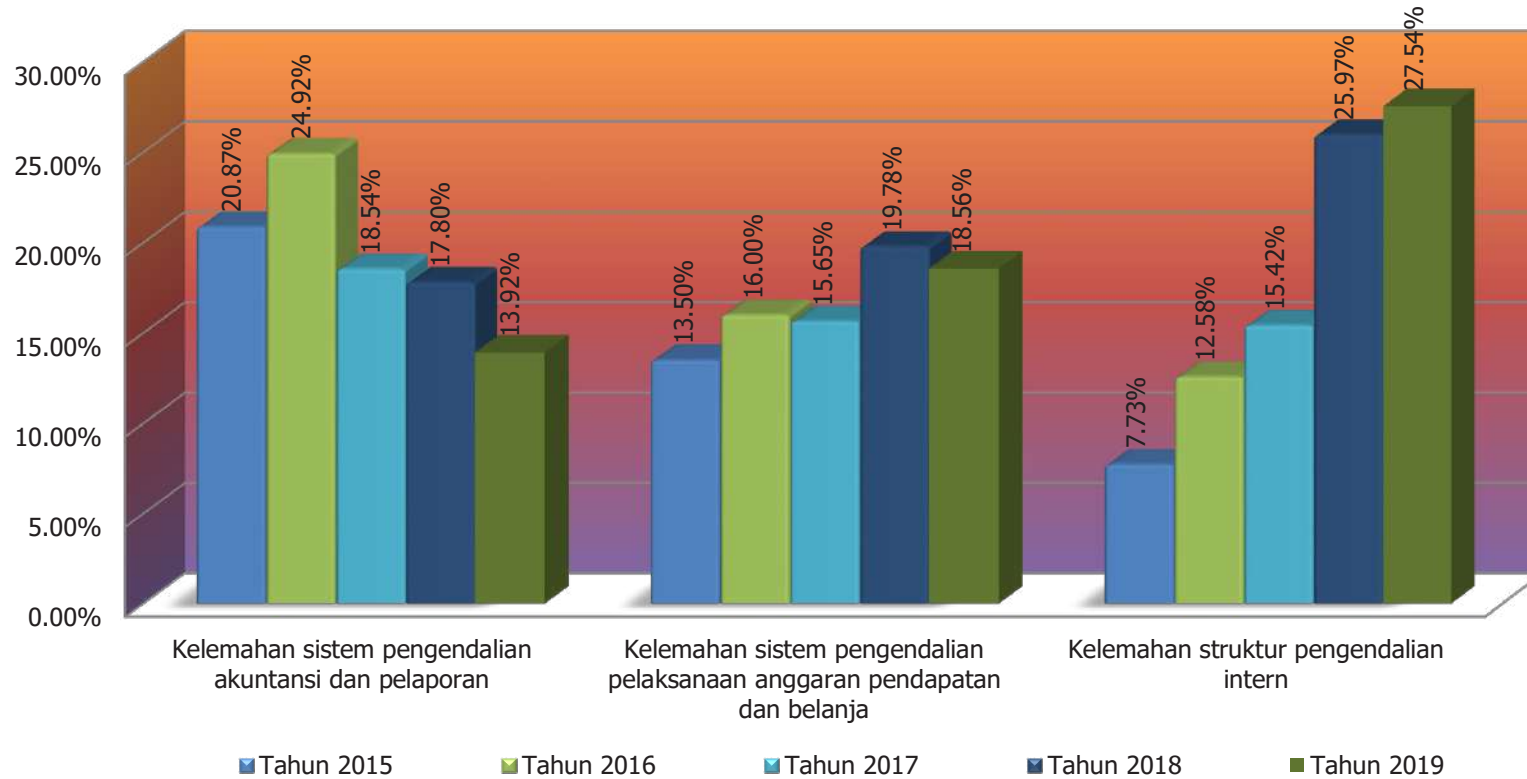
### Temuan Ketidapatuhan Terhadap Peraturan



Gambar 10. Persentase Klasifikasi Temuan Audit Ketidapatuhan Terhadap Peraturan Tahun 2015 s.d. 2019

Untuk melihat perbandingan setiap jenis temuan tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Gambar 11 berikut.

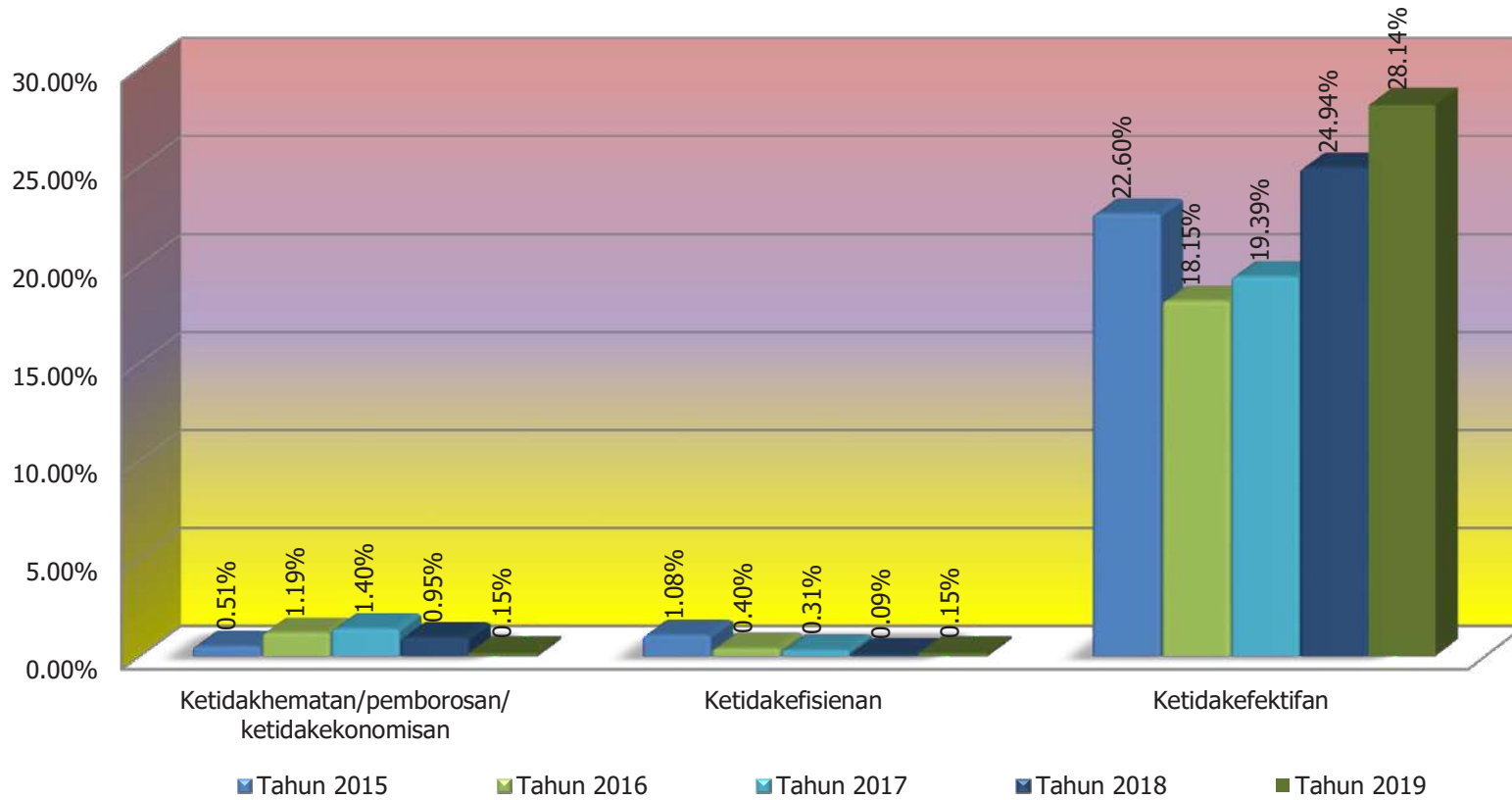
### Temuan Kelemahan Sistem Pengendalian Intern



Gambar 11. Persentase Klasifikasi Temuan Audit Kelemahan Sistem Pengendalian Intern Tahun 2015 s.d. 2019

Untuk melihat perbandingan setiap jenis temuan tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Gambar 12 berikut.

### Temuan 3E



Gambar 12. Persentase Klasifikasi Temuan Audit 3E Tahun 2015 s.d. 2019

Data hasil audit intern yang tertuang dalam tabel 10 dari tahun 2015 s.d. 2019 berdasarkan jumlah temuan, terus mengalami penurunan dengan perhitungan jumlah margin penurunan antara tahun 2015 dan tahun 2019 sebesar 717 temuan, hal ini menunjukkan komitmen kinerja KLHK yang mengalami perbaikan dari tahun ke tahun. Berdasarkan dominansi temuan yang terjadi pada satker KLHK dari tahun ke tahun didominasi oleh temuan kelemahan sistem pengendalian intern yang rata-rata mencapai 53,75% setiap tahunnya, hal ini menunjukkan pengendalian intern KLHK sampai dengan tahun 2019 masih belum efektif. Hal positif terjadi pada kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan, meskipun tidak mendominasi temuan audit akan tetapi terjadi tren penurunan yang signifikan dari 22,35% di tahun 2015 pada tahun 2019 menjadi 11,53% ini menunjukkan Satker KLHK telah mampu meningkatkan kepatuhan dari waktu ke waktu. Sedangkan pada kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian intern mengalami pelonjakan kenaikan dari 42,09% di tahun 2015 menjadi 60,39% pada tahun 2019 ini menunjukkan Satker KLHK masih kurang memahami Sistem Pengendalian Intern.

Berdasarkan data yang digambarkan dalam tiga grafik kelompok temuan, pada gambar 10 grafik kelompok temuan ketidakpatuhan terhadap peraturan yang paling menunjukkan penurunannya ada pada sub kelompok temuan kerugian negara/daerah atau kerugian negara/daerah yang terjadi pada perusahaan milik negara/daerah rata-rata temuan 17,69% pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Akan tetapi temuan tinggal 4,04% dari seluruh temuan yang terjadi di tahun 2019.

Pada gambar 11 yaitu kelompok temuan kelemahan Sistem Pengendalian Intern terdapat lonjakan kenaikan pada sub kelompok temuan Kelemahan Struktur Pengendalian Intern yang semula dari 7,73% di tahun 2015 menjadi 27,54% pada tahun 2019. Akan tetapi pada sub kelompok temuan kelemahan sistem pengendalian akuntansi dan pelaporan mengalami penurunan yang semula 20,87% di tahun 2015 menjadi 13,92% pada tahun 2019.

Pada gambar 12 yaitu kelompok temuan aspek Efektifitas, Efisiensi dan Ekonomis, yang sangat mendominasi ada pada sub kelompok temuan ketidakefektifan dari tahun 2015 sampai dengan 2019 angka rata-rata jenis temuan ini menyentuh angka 22,64% per tahun. Namun pada sub kelompok temuan ketidakefisienan mengalami penurunan yang semula dari 1,08% di tahun 2015 menjadi 0,15% pada tahun 2019.

## H. Jenis Rekomendasi Tahun 2015 s.d. 2019

Klasifikasi jenis rekomendasi hasil audit kinerja tahun 2015 s.d. 2019 sesuai dengan peraturan MenPAN dan RB Nomor 42 Tahun 2011 disajikan pada Tabel 11 berikut.

Tabel 11. Klasifikasi Jenis Rekomendasi Hasil Audit Kinerja Tahun 2015 s.d. 2019

Kel	Rekomendasi	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jml	%	Jml	%
01	Penyetoran ke kas Negara/daerah, kas BUMN/D dan masyarakat	323	11.75	310	12.33	333	11.32	85	2.76	40	1.84
02	Pengembalian barang kepada Negara, daerah, BUMN/D dan masyarakat	1	0.04	4	0.16	4	0.14	4	0.13	3	0.14
03	Perbaikan fisik barang/jasa dalam proses pembangunan atau penggantian barang/jasa oleh rekanan	14	0.51	11	0.44	11	0.37	15	0.49	9	0.41
04	Penghapusan barang milik Negara/daerah	11	0.40	18	0.72	16	0.54	17	0.55	16	0.74
05	Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian	40	1.46	62	2.47	73	2.48	10	0.32	7	0.32
06	Perbaikan laporan dan penertiban administrasi / kelengkapan administrasi	785	28.56	720	28.64	830	28.22	899	29.21	649	29.87
07	Perbaikan sistem dan prosedur akuntansi dan pelaporan	129	4.69	175	6.96	173	5.88	254	8.25	176	8.10
08	Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian	622	22.63	459	18.26	530	18.02	325	10.56	206	9.48

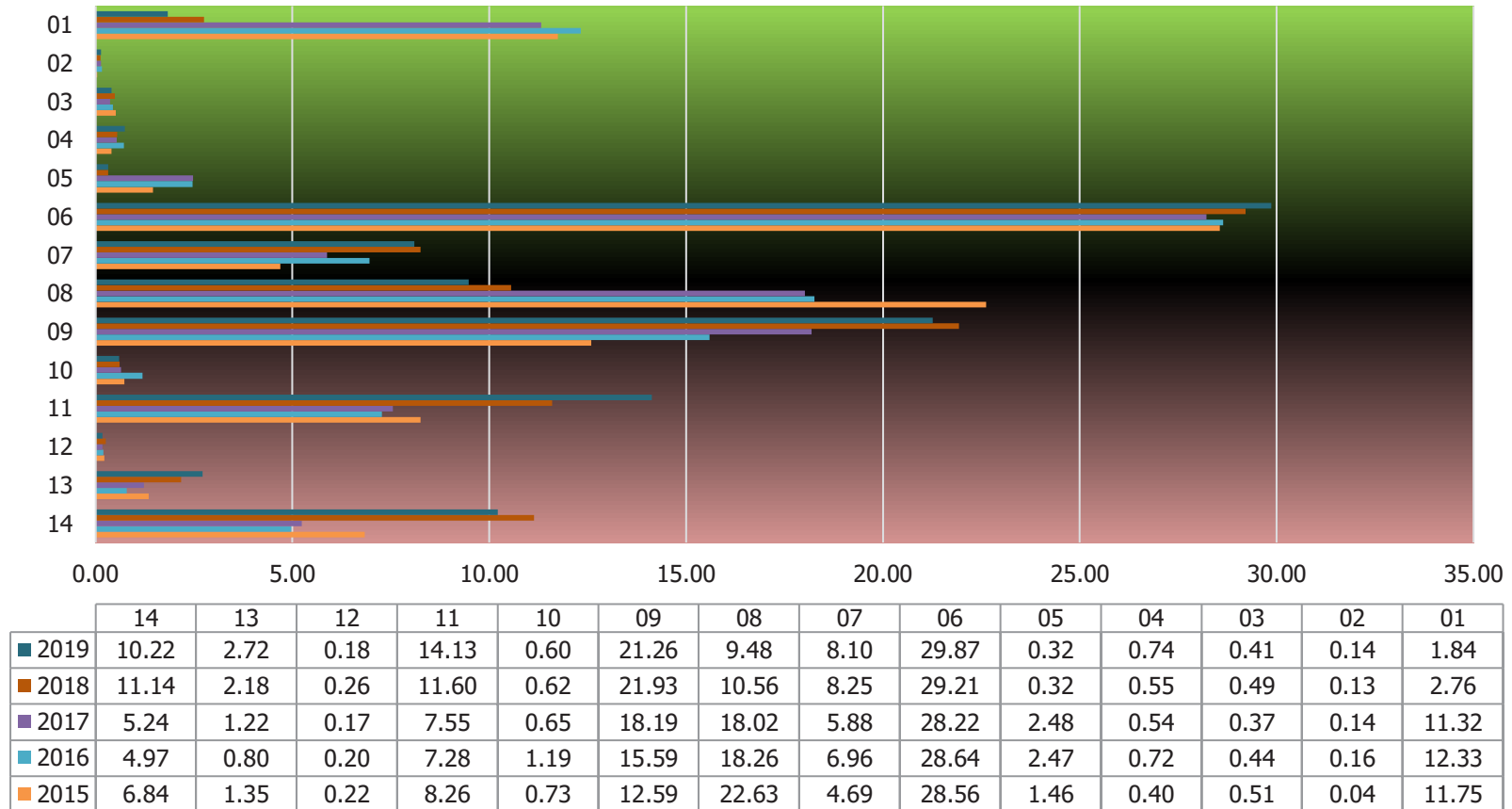
Kel	Rekomendasi	2015		2016		2017		2018		2019	
		Jmlh	%	Jmlh	%	Jmlh	%	Jml	%	Jml	%
09	Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan	346	12.59	392	15.59	535	18.19	675	21.93	462	21.26
10	Perubahan atau perbaikan struktur organisasi	20	0.73	30	1.19	19	0.65	19	0.62	13	0.60
11	Koordinasi antar instansi termasuk juga penyerahan penanganan kasus kepada instansi yang berwenang	227	8.26	183	7.28	222	7.55	357	11.60	307	14.13
12	Pelaksanaan penelitian oleh tim khusus atau audit lanjutan oleh unit pengawas intern	6	0.22	5	0.20	5	0.17	8	0.26	4	0,18
13	Pelaksanaan sosialisasi	37	1.35	20	0.80	36	1.22	67	2.18	59	2,72
14	Lain-lain	188	6.84	125	4.97	154	5.24	343	11.14	222	10.22
<b>Jumlah</b>		<b>2.749</b>	<b>100</b>	<b>2.514</b>	<b>100</b>	<b>2.941</b>	<b>100</b>	<b>3.078</b>	<b>100</b>	<b>2.173</b>	<b>100</b>

Keterangan : Rekomendasi lain-lain adalah jenis rekomendasi selain 13 kode rekomendasi tersebut, misalnya rekomendasi terkait dengan pihak lain (Dinas kabupaten/kota atau perusahaan) dan lain sebagainya.

Untuk melihat perbandingan setiap jenis rekomendasi hasil audit kinerja tahun 2015 s.d. 2019 dapat dilihat pada Gambar 13 berikut.



### Rekomendasi Hasil Audit



Gambar 13. Persentase Klasifikasi Jenis Rekomendasi Tahun 2015 s.d. 2019

Berdasarkan tabel 11 dan gambar 13, terjadi hal positif dimana terjadi penurunan rekomendasi sebanyak yang semula 2749 rekomendasi di tahun 2015 menjadi 2173 pada tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Inspektorat Jenderal. Untuk jenis rekomendasi Penyetoran ke kas Negara/daerah (01) juga mengalami penurunan drastis sebanyak yang semula 323 rekomendasi di tahun 2015 menjadi 40 rekomendasi pada tahun 2019, rekomendasi Peningkatan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia pendukung sistem pengendalian (08) yang semula 622 rekomendasi di tahun 2015 menjadi 206 rekomendasi pada tahun 2019, dan rekomendasi Pelaksanaan sanksi administrasi kepegawaian (05) yang semula 40 rekomendasi di tahun 2015 menjadi 7 rekomendasi pada tahun 2019.

Rekomendasi perbaikan laporan dan penertiban administrasi/kelengkapan administrasi (06) merupakan rekomendasi paling dominan pada tahun 2015 (28,56%), tahun 2016 (28,64%), tahun 2017 (28,22%), tahun 2018 (29,21%), dan tahun 2019 (29,87%). Rekomendasi peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sistem pengendalian (08) merupakan rekomendasi dominan kedua pada tahun 2015 (22,63%), dan tahun 2016 (18,26%). Sedangkan rekomendasi Perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (09) dominan kedua pada tahun 2018 (21,93%), dan tahun 2019 (21,26%).

Rekomendasi perubahan atau perbaikan prosedur, peraturan dan kebijakan (09) merupakan rekomendasi paling dominan ketiga pada tahun 2017 (18,19%). Sedangkan rekomendasi dominan ketiga pada tahun 2017 adalah peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pendukung sistem pengendalian (08) sebesar 18,02%.

### **I. Pengaduan Masyarakat (Dumas) Tahun 2015 s.d 2019**

Pengaduan masyarakat tahun 2015 s.d. 2019 yang telah ditangani oleh Inspektorat Jenderal diterima melalui surat dan *SMS/Media Online*. Pengaduan masyarakat pada Inspektorat Jenderal ditangani oleh Inspektorat Investigasi.

Jumlah penanganan pengaduan masyarakat pada tahun 2015 sebanyak 133 kasus di antaranya melalui surat sebanyak 108 dan melalui *SMS/media online* sebanyak 25, tahun 2016 sebanyak 71 kasus di antaranya melalui surat sebanyak 57 dan melalui *SMS/media online* sebanyak 14, tahun 2017 sebanyak 71 kasus di antaranya melalui surat sebanyak 64 dan melalui *SMS/media online* sebanyak 7, tahun 2018 sebanyak 61 kasus di antaranya melalui surat sebanyak 51 dan melalui *SMS/media online* sebanyak 10, dan tahun 2019 sebanyak 48 kasus di antaranya melalui surat sebanyak 41 dan melalui *SMS/media online* sebanyak 7. Tindak lanjut dari pengaduan masyarakat tersebut secara rinci tersaji pada Tabel 12.

Tabel 12. Rekapitulasi Penanganan Pengaduan Masyarakat Tahun 2015 s.d. Tahun 2019

No	Tindak Lanjut	Tahun				
		2015	2016	2017	2018	2019
<b>A</b>	<b>Pengaduan masyarakat melalui surat</b>					
1	Penyelesaian diserahkan kepada Eselon I atau instansi terkait	34	14	20	6	3
2	Penyelesaian diserahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Kasus LHK	8	-	-	8	-
3	Dilakukan Audit Investigasi	7	4	6	4	7
4	Dilakukan Identifikasi Khusus	15	16	15	7	5
5	Diusulkan Audit Investigasi	3	-	-	-	-
6	Diusulkan Identifikasi Khusus	7	7	-	1	-
7	Telah dilakukan identifikasi khusus dan diusulkan audit Investigasi	-	-	-	-	-
8	Ditangani oleh Instansi lain	1	3	-	-	-
9	Diusulkan pengumpulan bahan dan keterangan (Pulbaket)	2	-	-	1	2
10	Dilakukan Pulbaket dan pengecekan lapangan	-	-	2	6	10
11	Dalam proses penelaahan	-	-	-	9	2
12	Penyelesaian ditangani unit kerja lain	6	-	-	-	-
13	Tidak dapat ditindaklanjuti	24	13	17	8	12
14	Monitoring hasil tindak lanjut penanganan eselon I/ Unit kerja terkait lainnya	-	-	-	-	-
15	Telah dilakukan klarifikasi dan tidak terbukti	-	-	3	-	-
16	Akan dilakukan penanganan bersama Eselon I lain	-	-	1	1	-
17	Proses pengumpulan data awal	1	-	-	-	-

Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui surat (A)		108	57	64	51	41
<b>B</b>	<b>Pengaduan masyarakat melalui SMS / Media Online</b>					
<b>1</b>	Penyelesaian diserahkan kepada Eselon I atau instansi terkait	6	1	2	1	-
<b>2</b>	Penyelesaian diserahkan kepada Tim Penanganan Pengaduan Kasus LHK	2	-	-	-	-
<b>3</b>	Dilakukan Audit Investigasi	1	6	3	-	1
<b>4</b>	Dilakukan Identifikasi Khusus	8	1	2	3	1
<b>5</b>	Diusulkan dilakukan Identifikasi khusus	-	1	-	1	-
<b>6</b>	Diusulkan dilakukan audit investigasi	1	1	-	-	1
<b>7</b>	Dilakukan survei pendahuluan	1	-	-	-	-
<b>8</b>	Diusulkan untuk diserahkan ke unit kerja lain	1	-	-	-	-
<b>9</b>	Penyelesaian ditangani instansi lain	-	-	-	-	-
<b>10</b>	Dilakukan Pulbaket dan pengecekan lapangan	-	-	-	1	-
<b>11</b>	Dilakukan Audit oleh Inspektorat Wilayah	1	-	-	-	-
<b>12</b>	Dalam proses penelaahan	-	-	-	2	2
<b>13</b>	Tidak dapat ditindaklanjuti	3	4	-	2	2
<b>14</b>	Dilakukan Pengumpulan Data	1	-	-	-	-
<b>Jumlah Pengaduan Masyarakat melalui SMS (B)</b>		<b>25</b>	<b>14</b>	<b>7</b>	<b>10</b>	<b>7</b>
<b>TOTAL (A+B)</b>		<b>133</b>	<b>71</b>	<b>71</b>	<b>61</b>	<b>48</b>



